

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 180 / 230 / 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI BLORA TAHUN 2023
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun rencana penyusunan produk hukum daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Blora, maka Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/075/2023 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 perlu disesuaikan dan diganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora 45 Tahun 2019 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

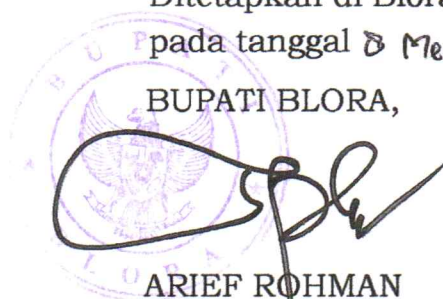
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/075/2023 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : / /2023
TANGGAL :

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BLORA
TAHUN 2023

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|---|--|------|
| 1. | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA | |
| 2. | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Gas Hulu | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA | |
| 3. | Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora | RSUD dr. R. Soetijono Blora | |
| 4. | Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora | RSUD dr. R. Soeprapto Cepu | |
| 5. | Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Blora Tahun 2023-2027 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA | |
| 6. | Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Blora | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA KAB. BLORA | |
| 7. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 8. | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA | |
| 9. | Rencana Detail Tata Ruang Kec. Blora dan Kab. Blora Tahun 2023-2043 | DPUPR KAB. BLORA | |
| 10. | Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu dan Kab. Blora Tahun 2023-2043 | DPUPR KAB. BLORA | |
| 11. | Layanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLORA | |
| 12. | Manajemen Talenta | BKD KAB. BLORA | |
| 13. | Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama | BKD KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|---|--|------|
| 14. | Tugas Belajar, Penerbitan Keterangan Belajar Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BKD KAB. BLORA | |
| 15. | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 16. | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 17. | Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan APBD Kab. Blora | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 18. | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 19. | Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 20. | Standar Harga Satuan | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 21. | Analisis Standar Belanja | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 22. | Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 23. | Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 24. | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 25. | Penetapan Nilai Sewa Reklame | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 26. | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 27. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 28. | Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat | SATPOL PP KAB. BLORA | |
| 29. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA | |
| 30. | Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA | |
| 31. | Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat | INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA | |
| 32. | Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa | INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|---|---|------|
| 33. | Pemberdayaan Usaha Mikro | DINDAGKOP UKM KAB. BLORA | |
| 34. | Penyelenggaraan Koperasi | DINDAGKOP UKM KAB. BLORA | |
| 35. | Pengelolaan Pasar Daerah | DINDAGKOP UKM KAB. BLORA | |
| 36. | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah | BAPPEDA KAB. BLORA | |
| 37. | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora | BAPPEDA KAB. BLORA/BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 38. | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data | BAPPEDA KAB. BLORA | |
| 39. | Komisi Disabilitas | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 40. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Anak | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 41. | Perlindungan Anak | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 42. | Kabupaten Layak Anak | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 43. | Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 44. | Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting | DINKES KAB. BLORA | |
| 45. | Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 | BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA | |
| 46. | Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora | BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA | |
| 47. | Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora | BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|--|--|------|
| 48. | Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora | BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA | |
| 49. | Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 50. | Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Blora | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 51. | Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok Di Kabupaten Blora | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 52. | Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 53. | Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 54. | Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 55. | Pedoman Pengelolaan Aset Desa | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 56. | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 57. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 58. | Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora | DINAS PMD KAB. BLORA | |
| 59. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 60. | Perubahan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kabupaten Blora | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 61. | Pedoman Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 62. | Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 63. | Pengaturan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|---|---|------|
| 64. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 | BAPPEDA KAB. BLORA | |
| 65. | <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2022-2046 | DINDALDUK KB KAB. BLORA | |
| 66. | Peraturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BKD KAB. BLORA | |
| 67. | Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara | BKD KAB. BLORA | |
| 68. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata | DINPORABUDPAR KAB. BLORA | |
| 69. | Cagar Budaya | DINPORABUDPAR KAB. BLORA | |
| 70. | Penyelenggaraan Perpustakaan | DPK KAB. BLORA | |
| 71. | Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | DPK KAB. BLORA | |
| 72. | Perpustakaan Desa | DPK KAB. BLORA | |
| 73. | Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan | DINDALDUK KB | |
| 74. | Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 75. | Pembinaan dan Pengawasan BLUD | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 76. | Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Blora | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 77. | Rencana Strategis | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 78. | Standar Pelayanan Minimal | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 79. | Penyusunan, Pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 80. | Pelaksanaan Anggaran | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 81. | Pengadaan Barang dan Jasa | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|-----|--|--|------|
| 82. | Tata Cara Penghapusan Piutang | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 83. | Tata Cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 84. | Tata Cara Kerja Sama | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 85. | Pengelolaan Investasi | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 86. | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 87. | Kebijakan Akuntansi | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 88. | Penilaian Kinerja BLUD dan Laporan Dewan Pengawas | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 89. | Laporan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan kepegawaian | RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 90. | Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 91. | Pembinaan dan Pengawasan BLUD | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 92. | Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Blora | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 93. | Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD di Kab Blora | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 94. | Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD di Kab Blora | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 95. | Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dr R Soetijono Blora | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 96. | Tarif Layanan pada RSUD Kab Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|------|---|---|------|
| 97. | Pengadaan Barang dan Jasa | RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA | |
| 98. | Penyelenggaraan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA | |
| 99. | Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kawasan Wonorejo Kecamatan Cepu | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA | |
| 100. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora | BAGIAN KESRA SETDA KAB. BLORA | |
| 101. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KAB. BLORA | |
| 102. | Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora | DPK KAB. BLORA | |
| 103. | Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 104. | Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Program 1 (satu) Desa 2 (dua) Sarjana | DINSOS P3A KAB. BLORA | |
| 105. | Program Blora Pintar | DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA | |
| 106. | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | BPPKAD KAB. BLORA | |
| 107. | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora | DINAS PENDIDIKAN KAB BLORA | |
| 108. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 tahun 2022 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026 | BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA | |
| 109. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA | |
| 110. | Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | BPPKAD KAB. BLORA | |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA | KET. |
|------|--|--|------|
| 111. | Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora | DINKES KAB. BLORA | |

 BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN